

## Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Penipuan

Fangela Myas Sari<sup>1\*</sup>, Siska Dewi<sup>2</sup>, Nur Rokhman<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala, Jakarta, Indonesia.  
<sup>2,3</sup> Institut Teknologi dan Sains Nahdhatul Ulama, Pekalongan, Indonesia

E-mail: [fangelamyassari@gmail.com](mailto:fangelamyassari@gmail.com)<sup>1\*)</sup>  
[siskadewi2304@gmail.com](mailto:siskadewi2304@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[nrkhmn@.gmail.com](mailto:nrkhmn@.gmail.com)<sup>3)</sup>

### ARTICLE INFO

Article history:  
Received 11 Desember  
2023  
Received in Revised 20  
April 2024  
Accepted 30 November  
2024

Keyword's :  
Corporate social  
responsibility,  
manajemen laba, nilai  
perusahaan, CSR,  
earnings management

### ABSTRACT

*This research aims to find out whether research examining financial pressure, education level and internal control systems can influence tax avoidance and Fraud. Previous research used quantitative research and the data still used secondary data. The advantage of this research is that this research is different from previous research because this research uses primary data. This research is different from previous research because it combines education level systems and financial pressures that can influence tax avoidance and Fraud. This research method uses primary data and is processed using the Smart PLS 3.0 data processing application.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah riset dalam meneliti tentang tekanan keuangan, tingkat Pendidikan dan system pengendalian internal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dan penipuan. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif dan data nya masih menggunakan data sekunder, kelebihan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu karena menggabungkan antara sistem tingkat Pendidikan dan tekanan keuangan yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan penipuan. Metode penelitian ini dengan menggunakan data primer dan di olah dengan aplikasi olah data Smart PLS 3.0.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>

This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



\* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: [fangelamyassari@gmail.com](mailto:fangelamyassari@gmail.com)

Peer review under responsibility of Akuisisi : Accounting Journal. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

## PENDAHULUAN

Di Indonesia merupakan negara yang ada hukum mengenai perpajakan yang ketat dimana pemungutannya dilakukan secara personal individu. Pajak merupakan pungutan dari masyarakat untuk negara guna mensejahterakan masyarakat dan negara dimana pengaruhnya atau imbalannya secara tidak langsung dan bersifat memaksa untuk meningkatkan nilai kekayaan bersih negara dan meningkatkan nilai suatu negara. Implementasi penerapan pengendalian internal yang masih kurang efektif dan masih bisa menjadi celah untuk melakukan kecurangan akuntansi, kecurangan korupsi dan kecurangan tersebut harus dicegah untuk bisa menghindari adanya kecurangan.

*Fraud* di negara Indonesia ini masih sering terjadi di organisasi sektor publik dan swasta. (ACFE, 2016) mendefinisikan penipuan sebagai "penyajian yang keliru atas kebenaran atau penyembunyian fakta material untuk mendorong orang lain untuk bertindak demi kerugiannya". ACFE mengkategorikan penipuan menjadi tiga kelompok: Penipuan Laporan Keuangan, Penyelewengan aset, Korupsi. *Fraud* tidak terjadi di Indonesia saja namun *Fraud* juga terjadi seluruh di dunia seperti perusahaan Enron dengan Estimasi kerugian: USD74 miliar. Perusahaan energi raksasa, Enron bangkrut pada 2001. Hal ini menjadi kebangkrutan terbesar dalam sejarah AS. Perusahaan ini bangkrut akibat skema penipuan akuntansi yang spektakuler, didalangi oleh para eksekutif perusahaan. Ribuan karyawan Enron mendapati dana pensiun yang harusnya mereka dapatkan, lenyap hanya dalam kurun waktu semalam, dan saham perusahaan jatuh dari USD 90,75 menjadi USD 0,67.

*Fraud* merupakan tindakan yang disengaja dalam melakukan kecurangan dengan cara berbohong, mengelabui, dan merekayasa sesuatu yang berdampak dapat menimbulkan cedera bagi seseorang korban serta merugikan pihak lain baik individu maupun kelompok. Jenis – jenis dalam *Fraud* sebenarnya cukup banyak dan dapat digolongkan dalam tiga kategori yaitu penipuan laporan keuangan biasanya dilakukan oleh dunia industri yang akan menaikkan harga saham dan menaikkan laba dengan cara mengubah dan merekayasa laporan keuangan.

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat untuk negara guna mensejahterakan masyarakat dan negara dimana pengaruhnya atau imbalannya secara tidak langsung dan bersifat memaksa untuk meningkatkan nilai kekayaan bersih negara dan meningkatkan nilai suatu negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013) dalam (Intansari, 2019). Kasus penghindaran pajak di

ungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi.

Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) diuraikan oleh Suandy (2011:21) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku. (Hidayati & Fidiana, 2017).

Penghindaran pajak memiliki dampak yang luas bagi Negara dan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi dampak penghindaran pajak menimbulkan biaya bagi manajemen, pemegang saham dan masyarakat luas (Lanis dan Richardson, 2012). Dalam (Suprapti, 2017). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Chasbiandani & Martani, 2012). Penghindaran pajak merupakan salah satu bagian dari perencanaan pajak (*Tax Planning*) yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Hal ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan upaya untuk memperkecil pajak dengan cara yang *illegal*, atau tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Intansari, 2019). Selain penghindaran pajak ada juga penghindaran penipuan menurut ACFE (2016) mendefinisikan penipuan sebagai “penyajian yang keliru atas kebenaran”.

Hal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dan penipuan yaitu tekanan keuangan dimana tekanan keuangan yang sangat parah dapat membuat seseorang menghindari pajak dan melakukan penipuan. Menurut Cressey (1953) tekanan untuk melakukan Fraud

termasuk semua hal seperti tekanan keuangan, tuntutan ekonomi, dan gaya hidup, serta tekanan pribadi termasuk hal keuangan dan non keuangan. Kazimean, et al (2019) menemukan hal bahwa tekanan dapat terjadi dari masalah pribadi, seperti tekanan keuangan atau tekanan tambahan dan pekerjaan tekanan lingkungan, seperti melakukan berbagai pekerjaan dalam jumlah yang berlebihan diteliti oleh manajemen sebagai akibat dari kelemahan pekerjaan.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dan penipuan yaitu tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat semakin mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku (Tyas, 2013). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin mudah untuk memahami peraturan perpajakan (Nurmantu, 2005) dalam (Intansari, 2019). Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia harus ada sistem kendali yaitu berupa pengendalian internal untuk mencegah penghindaran pajak serta penipuan yang dapat merugikan negara untuk menciptakan wujud dari penerimaan pajak (Soleman, 2013) pencegahan Fraud dilakukan melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan dan perbaikan moral individu pada setiap level dalam organisasi. Pengendalian internal sangat berperan dalam aspek bisnis dalam hal pencegahan penghindaran pajak dan penipuan. (Yasmin et all, 2021).

UMKM merupakan perputaran ekonomi di Indonesia dan UMKM memiliki pengaruh yang sangat tinggi untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia lebih banyak pengusaha dan UMKM maka akan meningkatkan nilai ekonomi suatu negara yaitu Indonesia karena ekonomi akan tumbuh sebanding dengan pertumbuhan UMKM dengan adanya UMKM masyarakat dituntut untuk menjadi pengusaha dan sebagai produsen serta diharapkan dapat mengimpor produknya keluar negeri untuk meningkatkan pajak dari luar negeri. UMKM di Kota Pekalongan lebih besar menekuni usaha Batik yang sudah menjadi warisan leluhur dan batik sudah di akui oleh dunia yaitu UNESCO. Sehingga penelitian ini di lakukan di UMKM Grosir Setono Pekalongan.

Penelitian terdahulu yang telah meneliti tentang penghindaran pajak dan penipuan yang telah dilakukan oleh (Stankevicius & Leonas, 2015) menyatakan penelitian teoritis menganalisis interaksi antara perilaku wajib pajak dan status sosial mereka, dan tidak hanya alasan motivasi individu untuk menjelaskan tingkat penghindaran pajak dan sebagai hasil penelitian. Kerangka model adalah penggabungan unik model deteksi dan kemampuan pemrosesan data besar, dikombinasikan dengan Potret psikologis-sosial para penghindar pajak akan memungkinkan mereka untuk diidentifikasi dengan cepat, meskipun ini tidak berarti

bahwa mereka akan melakukan tindakan ilegal. Suprapti (2017), mengungkapkan *Return On Asset* (ROA) merupakan tekanan keuangan bagi Perusahaan ketika kinerja profitabilitas menjadi target yang harus dicapai dan diteliti. Hasil menunjukkan arah negatif, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan sampel tidak dalam keadaan baik tekanan finansial karena rata-rata ROA lebih rendah dibandingkan suku bunga deposito.

Penelitian terdahulu yang telah meneliti tingkat Pendidikan terhadap penghindaran pajak yakni (Intansari, 2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi penghindaran pajak. Religiusitas terbukti memoderasi tingkat pendidikan terhadap penghindaran pajak, namun etika tidak terbukti memoderasi tingkat pendidikan terhadap penghindaran pajak. Lingkungan sosial tempat wajib pajak berada pun tidak terbukti memoderasi tingkat Pendidikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah riset dalam penerapan pengendalian internal yang baik dan rendahnya tekanan keuangan serta tingkat pendidikan yang tinggi bisa mencegah penghindaran pajak dan penipuan. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif dan dengan data masih menggunakan data sekunder, namun untuk kelebihan dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer dan menggunakan analisis dengan software Warp PLS dan studi kasus penelitian ini pada UMKM Grosir Setono Pekalongan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional (*correlational research*) adalah penelitian yang akan menguji keterikatan antar variabel baik dalam bentuk hubungan maupun pengaruh. (Nurhayati, 2012).

### **Populasi dan Sampel**

Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, atau hal-hal menarik yang diinginkan peneliti menyelidiki. sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi. (Roger Bougie, 2016). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan oleh peneliti adalah UMKM Grosir Setono Pekalongan.

### **Metode Penarikan Sampel**

Metode penarikan sampel atau teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *Probability Sampling* dimana semua populasi bisa di jadikan sampel. Teknik Sensus sampling (sampling jenuh) menurut Sugiyono (2012: 68) yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Karena penelitian ini berfokus

pada penghindaran pajak dan fraud akuntansi dan dilakukan di UMKM Grosir Setono Pekalongan maka semua populasi bisa dijadikan sampel.

### **Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Data primer adalah data dikumpulkan secara langsung untuk selanjutnya analisis untuk menemukan solusi untuk masalah yang diteliti (Roger Bougie and Sekaran Uma 2016). Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui metode survei yang dilakukan dengan cara penyebaran keusioner yang secara langsung didistribusikan oleh peneliti kepada responden tanpa melalui perantara siapapun. Dan hal yang diperoleh dari para responden berupa jawaban kuesioner, opini, sikap, dan pengalaman.

### **Variabel Dependen dan Independen**

Pada variabel dependen yaitu penghindaran pajak *fraud* indikator pernyataan yang digunakan diukur dengan 6 (enam) item pertanyaan. Item ini diadaptasi studi sebelumnya tentang kemungkinan penghindaran pajak *fraud* di antara pejabat polisi kerajaan Malaysia oleh Karim et al. (2015) pengukuran indikator pernyataannya yaitu penggunaan fasilitas dan aset untuk keperluan pribadi seperti (mobil, motor, jaringan internet), meminjam uang untuk keperluan pribadi. Dan ketaatan pajak serta prinsip tepat waktu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Pada variabel independen yaitu *Internal Control System* (Sistem Pengendalian Internal) indikator pernyataan yang digunakan diukur dengan 3 (tiga) item pertanyaan. Item ini diadaptasi studi sebelumnya tentang efek dari internal control pada penyalahgunaan aset studi kasus di Vietnam oleh Horizons et al. (2018) pengukuran indikator pernyataannya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian internal, informasi dan komunikasi, pemantauan atau monitoring, yang bisa berdampak pada penghindaran pajak *fraud*.

Pengukuran semua variabel menggunakan instrumen kuesioner, dan diukur dengan Skala Likert menurut Sekaran dan Bougie (2016) Skala Likert adalah skala yang dirancang untuk menguji seberapa kuat responden setuju dengan sebuah pernyataan. pada skala likert ada lima poin pilihan sebagai berikut:

- Point 1 = Sangat tidak setuju (STS)
- Point 2 = Tidak setuju (TS)
- Point 3 = Netral (N)
- Point 4 = Setuju (S)
- Point 5 = sangat setuju (ST)

### **Teknik Analisis**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan data statistic yang diukur dengan menggunakan software Smart PLS versi 3.0 mulai dari pengukuran model (*outer model*), struktur model (*inner model*) dan pengujian hipotesis. Menurut Ratmono dan Solihin (2013) SEM PLS merupakan sebuah pendekatan pemodelan kausal yang bertujuan memaksimalkan variansi dari model variabel laten kriteria yang dapat dijelaskan (*explained variance*) oleh variabel laten predictor. SEM PLS dapat bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil dan model yang kompleks serta distribusi data relatif lebih luas, SEM PLS dapat menjadi metode yang tepat untuk pengujian teori

## HASIL DAN PEMBAHASAN

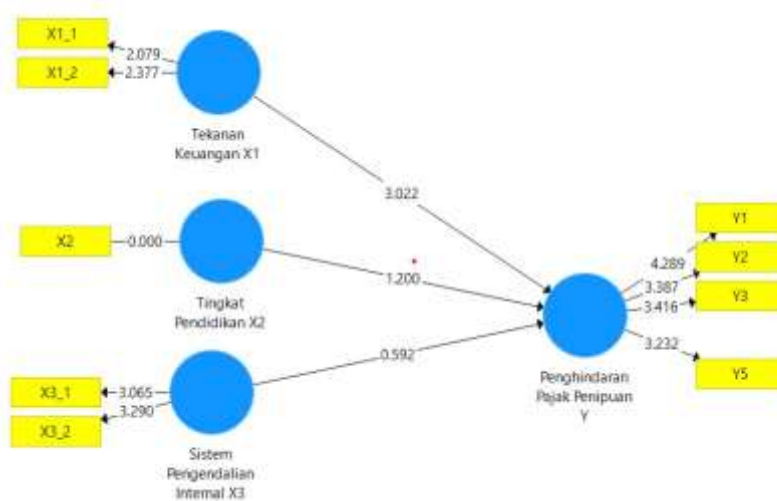
### Data Penelitian

Telah di jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa responden yang menjadi obyek adalah Staff atau Pegawai koperasi yang meliputi koperasi BPR dan BTM di Kabupaten Batang tahun 2022 yang mengelola keuangan di Koperasi. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 50 kuesioner yang dibagikan hanya kepada 7 (tujuh) koperasi, dikarenakan beberapa dinas tidak berkenan dan tidak ada respon. Staff atau pegawai koperasi yang diteliti meliputi staff yang menjabat sebagai kepala atau staf subbagian akuntansi atau penatausahaan keuangan. berikut distribusi penyebaran dan penerimaan kuesioner :

**Tabel 1. Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kuesioner yang disebar	75
2.	Kuesioner yang tidak kembali	(20)
3.	Kuesioner Kuesioner yang kembali	(55)

Sumber : Data Primer diolah 2022



**Gambar 1. Model Hasil**  
 Sumber: data primer yang diolah (2023)

**Tabel 2. Hasil Uji Validitas Konvergen**

Variabel	Pearson Correlation	P-Value	Keterangan
<b>Tekanan Keuangan</b>			
Item 1	0.752	0,000	Valid
Item 2	0.758	0,000	Valid
Item 3			
<b>Tingkat Pendidikan</b>			Valid
Item 1	1,000	0,000	Valid
<b>Sistem Pengendalian Internal</b>			
Item 1	0,913	0,000	Valid
Item 2	0,910	0,000	Valid
<b>Penghindaran Pajak Penipuan</b>			
Item 1	0,826	0,000	Valid
Item 2	0,865	0,000	Valid
Item 3	0,852	0,000	Valid
Item 4	0,614	0,000	Valid

Sumber: data primer yang diolah (2023)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa setiap indikator pernyataan valid. Untuk melihat valid tidaknya indikator pernyataan dilihat melalui Nilai *combine loading* yaitu harus mencapai nilai antara 0,5 dan 0,6 pernyataan tersebut dapat diterima dan valid (Yamin dan Kurniawan, 2011) namun jika nilai kurang dari  $< 0,5$  maka harus dihilangkan atau diremove dalam model penelitian. Hasil di atas menunjukkan setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih dari  $> 0,5$  maka di nyatakan valid

### Uji Reliabilitas dan Validitas

#### *Composite Reliability*

*Composite reliability* menguji nilai reliabilitas antara blok indicator dari konstruk yang membentuknya. Adapun hasil output *composite reliability* dapat diketahui pada tabel 4:

**Tabel 3. Hasil *Composite Reliability dan Validity***

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's Alpha	AVE
Tekanan Keuangan	0,907	0.796	0.831
Tingkat Pendidikan	0.726	0.744	0.569
Sistem Pengendalian Internal	0.1000	0.1000	0.1000
Penghindaran Pajak Penipuan	0.875	0.809	0.633

Sumber: data primer yang diolah (2023)

Menunjukkan bahwa diperoleh nilai *composite reliability* untuk variabel tekanan keuangan sebesar 0,907, variabel tingkat Pendidikan sebesar 0,726, variabel SPI sebesar 0,100 dan untuk variabel penghindaran pajak penipuan (*Fraud*) sebesar 0,875, untuk. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *composite reliability* > 0,70. Dengan demikian model dalam penelitian ini telah memenuhi *composite reliability*.

Untuk nilai *average variance extracted* (AVE) menunjukkan bahwa diperoleh nilai *average variance extracted* (AVE) untuk setiap konstruk > 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan model dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

### Evaluasi *Structural Model*

**Tabel 4. Hasil *R Squared***

Variabel	<i>R Squared</i>	<i>Adj R Square</i>
Tekanan Keuangan		
Tingkat Pendidikan	0.288	0.246
Sistem Pengendalian Internal		
Penghindaran Pajak Penipuan		

Sumber: data primer yang diolah (2023)

Koefisien determinasi menggunakan *R-squared* yang menunjukkan berapa persentase variansi konstruk endogen/kriterion dapat dijelaskan oleh konstruk yang dihipotesiskan mempengaruhinya (eksogen/prediktor). Semakin tinggi *R-squared* menunjukkan model yang baik. *R-squared* hanya ada untuk konstruk endogen. Sebagai contoh, *R-squared* konstruk sebesar 0,288 menunjukkan bahwa variansi variabel independen dapat dijelaskan sebesar 28,80% oleh variansi variabel dependen.

### Pengujian Hipotesis Dengan *Path Coefficient*

**Tabel 5. Hasil *Path Coefficient***

	Variabel / Konstruk	P. Value	Path Coefficient	Hasil
H <sub>1</sub>	Tekanan Keuangan -> Penghindaran Pajak Penipuan ( <i>Fraud</i> )	0.003	3.022	Diterima
H <sub>2</sub>	Tingkat Pendidikan -> Penghindaran Pajak Penipuan ( <i>Fraud</i> )	0.554	1.200	Ditolak
H <sub>3</sub>	Sistem Pengendalian Internal -> Penghindaran Pajak Penipuan ( <i>Fraud</i> )	0.231	0.592	Ditolak

Dari *path coefficient* di atas dapat dilihat nilai pengaruh positif atau negatif, dan untuk *p - value* yang digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Hipotesis dapat diterima jika *p value* < 0,05.

### Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan Tabel 6 : *Path Coefficient* terlihat bahwa tekanan keuangan berpengaruh

terhadap penghindaran pajak penipuan(*fraud*) berpengaruh signifikan dengan arah positif, ini dapat dilihat dari variabel tekanan keuangan pada *p-value* sebesar 0,003 atau lebih kecil dari  $< 0,05$  yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara tekanan keuangan terhadap penghindaran pajak penipuan(*fraud*) adalah positif signifikan. Dengan demikian hipotesis pertama diterima.

H<sub>1</sub> : Tekanan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak penipuan (*fraud*)

### **Pengujian Hipotesis 2**

Berdasarkan Tabel 6 : *Path Coefficient* terlihat bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan(*fraud*) tidak berpengaruh, ini dapat dilihat dari variabel tingkat pendidikan pada *p-value* sebesar 0,554 atau lebih besar dari  $> 0,05$  yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara tekanan keuangan terhadap penghindaran pajak penipuan(*fraud*) adalah tidak berpengaruh. Dengan demikian hipotesis kedua ditolak.

H<sub>2</sub>: Tekanan Keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan (*fraud*)

### **Pengujian Hipotesis 3**

Berdasarkan Tabel 6 : *Path Coefficient* terlihat bahwa sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan (*fraud*) tidak berpengaruh, ini dapat dilihat dari variabel sistem pengendalian internal (SPI) pada *p-value* sebesar 0,231 atau lebih besar dari  $> 0,05$  yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara sistem pengendalian internal (SPI) terhadap penghindaran pajak penipuan(*fraud*) adalah tidak berpengaruh. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.

H<sub>3</sub>: Sistem Pengendalian Internal (SPI) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan (*fraud*)

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Tekanan Keuangan terhadap Penghindaran Pajak Penipuan (*Fraud*)**

Dari pengujian hasil penelitian, terdapat pengaruh yang tekanan keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan(*fraud*) di grosir setono. Hal ini sesuai dengan hasil dari *p value* yang bernilai sebesar  $0,003 < 0,05$  sehingga dapat dikatakan variabel tekanan keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan(*fraud*). Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin banyaknya UMKM pedagang di grosir setono yang memiliki tekanan keuangan yang sangat tinggi maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh pedagang juga tinggi, hal ini di lihat dari jawaban kuesioner dengan pertanyaan bahwa para pedagang memiliki pengeluaran dan hutang yang tidak bisa di perkirakan yang lebih tinggi dari pemasukan atau pendapatan dari dagangan batik.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan kondisi ekonomi yang sekarang banyak para pedagang yang terlilit masalah keuangan dimana banyak pengeluaran dan hutang tapi minim pemasukan dan perkiraan keuangan yang tidak bisa di perkirakan seperti stock barang yang terlalu banyak tapi minim pembeli, serta dunia fashion yang harus mengikuti jaman dan *trend mode* yang sangat cepat pergantiannya membuat para pedagang batik mengalami kesulitan dalam menyetok barang yang harus sesuai dengan selera konsumen yang sangat berubah ubah mengikuti jaman dan *trend mode* serta banyaknya maraknya belanja *menggunakan e commerce* yang sangat di gemari di semua kalangan membuat pedagang di grosir setono mengalami masalah tekanan keuangan. Dalam hal ini tekanan yang di alami oleh para pedagang di grosir setono berupa tekanan lingkungan seorang pengusaha dan pemenuhan gaya hidup dan tuntutan ekonomi dari keluarga yang dari ekonomi dan gaya hidup seorang pengusaha yang di nilai sangat glamor baik secara materi atau keuangan dan non materi atau non keuangan sehingga memberikan motif serta pengaruh untuk menghindari pajak yang harus di bayar dan melakukan penipuan.

Tekanan keuangan adalah dimana tekanan dapat membuat seseorang menghindari pajak dan melakukan penipuan. Penelitian ini sesuai dengan Menurut penelitiannya Cressey (1953) tekanan untuk melakukan fraud. tekanan termasuk semua hal seperti tekanan keuangan, tuntutan ekonomi, dan gaya hidup, serta tekanan pribadi termasuk hal keuangan dan non keuangan. Dan penelitiannya oleh Kazimean, et al (2019) menemukan hal bahwa tekanan dapat terjadi dari (1) masalah pribadi, seperti tekanan keuangan atau tekanan tambahan dan (2) pekerjaan tekanan lingkungan, seperti melakukan berbagai pekerjaan dalam jumlah yang berlebihan diteliti oleh manajemen sebagai akibat dari kelemahan pekerjaan.

### **Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Penghindaran Pajak Penipuan (*Fraud*)**

Dari pengujian hasil penelitian, tidak terdapat pengaruh tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan(*fraud*) di grosir setono. Hal ini sesuai dengan hasil dari *p value* yang bernilai sebesar  $0,554 > 0,05$  atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan variabel tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan (*fraud*).

Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa tinggi maupun rendahnya tingkat pendidikan seorang pedagang batik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan, hal ini karena banyak yang untuk pembukuannya dan pencatatannya sampai pelaporan pajak banyak dilakukan oleh karyawannya sehingga hal ini tidak mempengaruhi penghindaran pajak penipuan karena pemilik atau *owner* hanya menerima laporannya saja tanpa tahu prosesnya

dalam membayar pajak dan membuat laporan pajak.

Hal ini menjadi catatan penting untuk pihak owner supaya melaporkan pajak serta menyetorkan pajaknya secara mandiri yaitu pajak UMKM. Jadi berpendidikan tinggi tidak menutup kemungkinan untuk lebih mengetahui peraturan pajak dari pada berpendidikan rendah. Karena pihak pedagang hanya melaporkan dan membayar pajak untuk pelaksanaan penginputan pajak di lakukan oleh staff pegawai perpajakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitiannya yang dilakukan oleh Lasmana dan Tjaraka (2011) orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara menghindari pajak dan penipuan sehingga tidak dapat dikatakan bahwa orang yang berpendidikan tinggi lebih patuh dari yang berpendidikan rendah.

### **Pengaruh Sistem Pengendalian (SPI) terhadap Penghindaran Pajak Penipuan (*Fraud*)**

Dari pengujian hasil penelitian, tidak terdapat pengaruh SPI berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan(*fraud*) di grosir setono. Hal ini sesuai dengan hasil dari *p value* yang bernilai sebesar  $0,231 > 0,05$  atau lebih besar dari  $0,05$  sehingga dapat dikatakan variabel SPI tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan(*fraud*).

Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa tinggi maupun rendahnya SPI pedagang batik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan, hal ini di karenakan banyak dari pedagang batik tidak memiliki SOP dalam dagang dan tidak menggunakan system pencatatan keuangan yang baik, seperti system untuk mencatat stock barang dan hasil penjualan dengan system sehingga terlihat laba yang dapat di implementasikan sebaik mungkin, dan pada hal pembagian tugas dan tanggung jawab di pedagang UMKM tidak ada pembagian tugas yang jelas seperti semuanya dilakukan oleh karyawan sehingga para karyawan merangkap sebagai pembukuan dan admin penjualan sehingga hal ini tidak mempengaruhi penghindaran pajak panipuan karena tidak ada pembagian tugas yang jelas serta tidak adanya system penjualan dan pencatatan yang digunakan seperti system akuntansi serta, tidak ada monitoring stock barang pembelian penjualan serta monitoring mengenai system yang jelas untuk di terapkan di perdagangan batik sehingga tidak mempengaruhi penghindaran pajak penipuan.

Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahardjo, 2018) yang dilihat dari aspek teori keagenan, pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi *tax avoidance* karena pengendalian internal termasuk sistem *monitoring* yang digunakan untuk menyurutkan asimetris informasi antara pemegang saham dan manajemen serta dapat menekan biaya

keagenan (Rahardjo, 2018). Dan tidak sepaham dengan riset yang dilakukan Gleason dan Pincus (2016) memberi bukti bahwa pengendalian internal yang memadai mengurangi penghindaran pajak. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif, perencanaan perpajakan yang sudah dirancang berjalan efektif dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa tekanan keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan (*fraud*) namun untuk variabel tingkat Pendidikan dan SPI tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan (*fraud*) di UMKM pedagang batik di Grosir Setono Kota Pekalongan. Dalam hal ini untuk variabel tekanan keuangan yang di alami oleh para pedagang di grosir setono berupa tekanan lingkungan seorang pengusaha dan pemenuhan gaya hidup dan tuntutan ekonomi dari keluarga yang dari ekonomi dan gaya hidup seorang pengusaha yang di nilai sangat glamor baik secara materi atau keuangan dan non materi atau non keuangan sehingga memberikan motif serta pengaruh untuk menghindari pajak yang harus di bayar dan melakukan penipuan.

Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa variabel tingkat pendidikan yaitu tinggi maupun rendahnya tingkat pendidikan seorang pedagang batik tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan, hal ini karena banyak yang untuk pembukuannya dan pencatatannya sampai pelaporan pajak banyak dilakukan oleh karyawannya sehingga hal ini tidak mempengaruhi penghindaran pajak penipuan karena pemilik atau *owner* hanya menerima laporannya saja tanpa tahu prosesnya dalam membayar pajak dan membuat laporan pajak.

Variabel SPI tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak penipuan di karenakan banyak dari pedagang batik tidak memiliki *Standar Operating Prosedure* (SOP) dalam dagang dan tidak menggunakan system pencatatan keuangan yang baik, seperti system untuk mencatat stock barang dan hasil penjualan dengan system sehingga terlihat laba yang dapat di implementasikan sebaik mungkin, dan pada hal pembagian tugas dan tanggung jawab di pedagang UMKM tidak ada pembagian tugas yang jelas seperti semuanya dilakukan oleh karyawan sehingga para karyawan merangkap sebagai pembukuan dan admin penjualan sehingga hal ini tidak mempengaruhi penghindaran pajak penipuan. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menambah beberapa variabel independen lain seperti kualitas SDM dan omzet penjualan yang diduga juga dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak penipuan

## REFERENCE

- ACFE. (2015). What is Fraud? *ANTI-FRAUD Resource Guide Laying The*.
- ACFE, S. G. F. (2016). REPORT TO THE NATIONS Letter from the President. In *Global Fraud Studi*. Association of Certified Fraud Examiners.
- COSO. (2013). *COSO Framework-Internal Control*. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
- Cressey, D. R. (1953). THE CRIMINAL VIOLATION OF FINANCIAL TRUST. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Harun, H., Tenriwaru, T., & Tjan, J. (2021). Nilai Budaya Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Penanggulangan Fraud dalam Pengelolaan Pajak Hotel di Kota Parepare. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 17(2), 131-140. doi:<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v17i2.642>
- Hermelinda, T., Rajagukguk, T., & Afriansyah, B. (2024). Fraud:Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemahaman Mahasiswa Akuntansi. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 20(1), 138-144. doi:<https://doi.org/10.24127/akuisisi.v20i1.1726>
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Corporate Governance Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Pengindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1053–1070. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1005/1019>
- Intansari, M. R. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Etika dan Lingkungan Sosial Terhadap Penghindaran Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi)*. May, 106.
- Irawan, F. (2022). Riset Kuantitatif Dan Kualitatif Penghindaran Pajak: Metode Apa Yang Tepat Untuk Indonesia. *Jurnalku*, 2(1), 16–24. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i1.128>
- Kazimean. (2019). Article information : Examining Fraud Risk Factors on Asset Misappropriation : Evidence from the Banking Industry. *Journal of Financial Crime*.
- Midyastuty. (2017). Penghindaran Pajak terhadap Struktur Modal Perusahaan. *Core.Ac.Uk*, 37. <https://core.ac.uk/download/pdf/151521836.pdf>
- Moeller, R. R. (2012). *COSO ENTREPRISE RISK MANAGEMENT (Establishing Effective Governance, Risk, and Compliance Processes)* (Second Edi). John Wiley & Sons, Inc.
- Nurhayati, S. (2012). Metodologi Penelitian Praktis. In *Universitas Pekalongan Press*.
- Omar, N. B., & Mohamad Din, H. F. (2010). Fraud diamond risk indicator: An assessment of its importance and usage. *CSSR 2010 - 2010 International Conference on Science and Social Research, July 2005*, 607–612. <https://doi.org/10.1109/CSSR.2010.5773853>
- Ratmono dan Solihin. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan Warp-PLS 3.0*. Penerbit ANDI.
- Roger Bougie, U. S. (2016). *Research Methods for Business*.
- Soleman, R. (2013). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pen cegahan fraud. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(1), 57–74. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol17.iss1.art5>

- Stankevicius, E., & Leonas, L. (2015). Hybrid Approach Model for Prevention of Tax Evasion and Fraud. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, 383–389. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.555>
- Suprpti, E. (2017). Pengaruh Tekanan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1013. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.15>
- Yasmin et all. (2021). *PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENCEGAHAN FRAUD PADA BISNIS ONLINE DI INDONESIA*. 6.